

ABSTRAK

Resiliensi Lembaga Adat sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa oleh Lembaga Adat Di Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)

Masyarakat kecamatan Delima, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang masih sangat kental menganut sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga Adat. Hal ini memang diatur dalam Qahun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Namun dengan perkembangan global dan pengetahuan dari masyarakat itu sendiri menjadi suatu tantangan terhadap resiliensi dari Lembaga Adat tersebut.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini *pertama*, Mengapa masyarakat Aceh lebih memilih menyelesaikan sengketa pada Lembaga Adat dibandingkan Pengadilan Pemerintah, *Kedua*, Bagaimanakah resiliensi Lembaga Adat Aceh sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa akan mampu bertahan di masa mendatang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris berdasarkan data sekunder dan data primer berupa wawancara dengan para pihak yang berkaitan secara langsung dengan masalah yang diteliti agar mendapatkan informasi yang sejelasnya sesuai keadaan di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk tesis.

Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan gambaran bahwa *pertama*, Selain karena prinsip „damai“ dan adat istiadat yang sudah sejak turun temurun, masyarakat menyelesaikan sengketa melalui lembaga adat karena penyelesaian melalui musyawarah bersifat sukarela, prosedur yang tepat sasaran, keputusan yang diambil merupakan kesepakatan bersama dan saling menguntungkan, fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu dan biaya serta pemeliharaan hubungan. *Kedua*, Resiliensi Lembaga Adat dimasa mendatang akan tetap bertahan dimana kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Adat tersebut masih tetap tumbuh. Juga dengan memperhatikan aspek internal dari lembaga adat tersebut yaitu *pertama*, Melakukan sosialisasi lembaga adat; *kedua*, Penguatan kapasitas perangkat (*fungsionaris*) lembaga adat dan Kelembagaan; *ketiga*, Membangun kerjasama antar lembaga; dan *keempat*, Komitmen dan keseriusan Pemerintah Aceh dalam mendukung pelaksanaan lembaga Adat.

Langkah praktis operasional untuk melaksanakan resiliensi dari Lembaga Adat dimasa mendatang dalam penelitian ini, disarankan agar bisa ditindaklanjuti dengan berbagai upaya *best efforts, best practices and best service* yang serius dan tegas dari semua pihak agar keberadaan dari lembaga adat ini tetap mendapatkan kepercayaan dimasyarakat Aceh.

Kata Kunci: **Resiliensi, Lembaga Adat, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Aceh.**

ABSTRACT

Resilience of Indigenous Institute as Alternative Dispute Resolution (Dispute Settlement Case Studies by the Indigenous Institute in Delima District, Pidie, Nanggroe Aceh Darussalam)

Delima district community, the province of Aceh, which is still very strong dispute settlement system adopted by Indigenous Institute. It is indeed set in Aceh Qahun Number. 10 of 2008 concerning Indigenous Institute. But with the global development and knowledge of the community it's becomes a challenge about the resilience of that.

Issues examined in this study *first*, why the Acehnese people prefer to resolve the dispute at the Institute of Indigenous Government compared Court, *Second*, How the resilience of the Institute as Alternative Dispute Resolution will be able to survive in the future.

The method used in this research is the empirical juridical approach based on secondary data and primary data such as interviews with the parties that are directly related to the problems examined in order to obtain information that according to circumstances on the ground, then presented in the form of a thesis.

The results of this study ultimately suggests that the first addition to the principle of 'peace' and customs that have for generations, communities resolve disputes through traditional institutions for settlement through consultation is voluntary, the procedure is right on target, the decision is a collective agreement and mutual benefit, flexibility in designing the terms of solving problems, saving time and cost and maintenance of a relationship. Second, the future resilience Indigenous Institute will remain where public confidence in the Indigenous Institute are still growing. Also by paying attention to the internal aspects of the traditional institutions: first, Socializing traditional institutions; second, strengthening the capacity of the device (functionaries) and Institutional traditional institutions; Third, Establish inter-agency cooperation; and fourth, commitment and seriousness of the Government of Aceh in supporting the implementation of the Indigenous organizations.

Practical steps to implement the operational resilience of Indigenous Institute in the future in this study, it is suggested that could be followed by a variety Efforts best efforts, best practices and best service serious and decisive of all parties to the existence of traditional institutions still get the trust the community of Aceh.

Keywords: Resilience, Indigenous Institute, Alternative Dispute Resolution, Aceh.